

Analisis Dampak Penataan Kawasan Batang Agam terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lokal

Muhammad Irsyad Ash-shiddiqie^{1✉}, Fery Andrianus²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas, Padang

irsyad.arch06@gmail.com

Abstract

This study analyses the impact of the Batang Agam area arrangement on the welfare of local communities in Payakumbuh City, West Sumatra, focusing on three main variables: area zoning regulations, infrastructure and environment. Through a quantitative approach with logistic regression method, data was collected from 106 businesses around the Batang Agam area. The results showed that environmental quality has a significant influence on increasing community income, with an odds ratio of 21,300.88. This indicates that a clean, safe and well-managed environment is a major factor in driving economic activity. In contrast, zoning regulations and infrastructure did not show a significant impact, possibly due to their sub-optimal implementation or inappropriate to local needs. These findings underscore the importance of environmental management as a key foundation in zoning, while emphasising the need to re-evaluate zoning and infrastructure policies to be more responsive to community needs. The research also highlights the importance of community participation in the planning process to ensure that development policies are truly inclusive and sustainable. The implication of these findings is the need for a holistic approach to zoning, which focuses not only on physical aspects, but also on improving the quality of life and well-being of local communities. As such, this research provides valuable input for local governments in designing more effective and sustainable development policies in riverside areas.

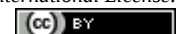
Keywords: *Area Planning, Community Welfare, Environment, Infrastructure, Zoning.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak penataan kawasan Batang Agam terhadap kesejahteraan masyarakat lokal di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, dengan fokus pada tiga variabel utama: peraturan zonasi kawasan, infrastruktur, dan lingkungan. Melalui pendekatan kuantitatif dengan metode regresi logistik, data dikumpulkan dari 106 pelaku usaha di sekitar kawasan Batang Agam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, dengan odds ratio mencapai 21.300,88, yang mengindikasikan bahwa lingkungan yang bersih, aman, dan terkelola dengan baik menjadi faktor utama dalam mendorong aktivitas ekonomi. Sebaliknya, peraturan zonasi kawasan dan infrastruktur tidak menunjukkan dampak yang signifikan, kemungkinan karena implementasinya yang belum optimal atau tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan lingkungan sebagai fondasi utama dalam penataan kawasan, sambil menekankan perlunya evaluasi ulang terhadap kebijakan zonasi dan infrastruktur agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar inklusif dan berkelanjutan. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pendekatan holistik dalam penataan kawasan, yang tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan di kawasan tepian sungai.

Kata kunci: Penataan Kawasan, Kesejahteraan Masyarakat, Lingkungan, Infrastruktur, Zonasi.

INFEK is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Kawasan tepian sungai memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai pusat aktivitas ekonomi [1]. Di Indonesia, sungai sering menjadi orientasi kehidupan masyarakat, terutama di daerah perkotaan dan pedesaan [2]. Kota Payakumbuh, yang dilalui oleh Sungai Batang Agam, merupakan salah satu contoh di mana penataan kawasan tepian sungai telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kota Payakumbuh memiliki luas wilayah sekitar 85,22 km², atau sekitar 0,20% dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Barat (sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019). Lokasinya yang

strategis menjadikan kota ini sebagai penghubung antara Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau.

Kota Payakumbuh dilalui oleh tiga sungai besar, yaitu Sungai Batang Agam, Sungai Batang Lampasi, dan Sungai Batang Sinamar, serta lima sungai kecil lainnya: Sungai Batang Pulau, Sungai Talang, Sungai Baih, Sungai Batang Sikali, dan Sungai Tembok Jua. Sungai Batang Agam terletak 125 km dari Kota Padang dan merupakan sungai terbesar di daerah tersebut, yang memiliki panjang sekitar 15,6 km dan lebar 25 m (Peraturan Wali Kota Payakumbuh No. 3 Tahun 2022). Sungai Batang Agam mengalir melalui empat kecamatan (Payakumbuh Selatan, Payakumbuh Barat, Payakumbuh Timur, dan Payakumbuh Utara)

dan sebelas kelurahan di Kota Payakumbuh. Namun, seiring dengan perkembangan kota, kawasan ini menghadapi tantangan serius seperti pencemaran, pendangkalan, dan banjir yang mengancam keberlangsungan ekosistem dan ekonomi masyarakat.

Tata kelola kawasan sungai yang baik dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan [3]. Kawasan sungai yang tertata dengan baik dapat meningkatkan nilai ekonomi melalui beberapa cara, Pariwisata, Transportasi, Irigasi, dan energi. Selain itu juga dapat membantu mengurangi risiko banjir dan bencana alam, serta meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat [4]. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penataan adalah proses, cara, perbuatan menata. Arti lainnya dari penataan adalah pengaturan. Sedangkan pengertian kawasan secara umum adalah suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang membedakannya dengan wilayah lainnya. Karakteristik ini dapat berupa geografi, budaya, ekonomi, atau aspek lain yang menjadi ciri khas dari kawasan tersebut [5].

Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan analisis, perencanaan, dan survei lapangan yang kemudian dilanjutkan dengan Penataan Kawasan Batang Agam. Hal ini dilakukan sebagai upaya pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk memperkuat daerah aliran sungai (DAS), mencegah banjir dan longsor sekaligus meningkatkan ruang terbuka hijau (RTH) serta meningkatkan fasilitas infrastruktur di kawasan tersebut [6]. Hal ini tergambar dari pembangunan fisik infrastruktur penataan kawasan Batang Agam dilakukan sejak tahun 2017 hingga 2019, dengan jarak 3,85 kilometer, dengan anggaran kurang lebih 169 miliar.

Hal ini dilakukan dengan tujuan menjadikannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru [7]. Proyek ini melibatkan pembangunan infrastruktur, normalisasi sungai, dan penciptaan ruang terbuka hijau. Namun, pertanyaan penting yang muncul adalah sejauh mana penataan kawasan ini benar-benar membawa kesejahteraan bagi masyarakat lokal [8]. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa penataan kawasan tepian sungai dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, terutama jika melibatkan partisipasi masyarakat dan memprioritaskan keberlanjutan lingkungan [9]. Studi kasus di berbagai negara, seperti revitalisasi Sungai Cheonggyecheon di Seoul menunjukkan bahwa keberhasilan proyek semacam ini bergantung pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, konservasi lingkungan, dan inklusivitas sosial [10].

Namun, penelitian di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, masih terbatas dalam mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat dalam konteks penataan kawasan tepian sungai [11]. Partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penataan, yang terdiri dari assessment, perencanaan, lobbying, implementasi, monitoring, dan evaluasi, berimplikasi positif terhadap perubahan kondisi fisik

lingkungan, perilaku masyarakat, dan peningkatan ekonomi [12]. Proses penataan dan pembangunan kawasan tepi sungai yang berkelanjutan, khususnya untuk negara-negara berkembang penting memperhatikan perencanaan yang mempertimbangkan lingkungan dan sosial dalam pengembangan kawasan tepi sungai [13].

Hal ini dapat memberi keuntungan dari pendekatan yang terintegrasi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, pelestarian ekosistem, dan pengurangan risiko bencana [14]. Penelitian lain menjelaskan pengembangan area sepanjang sungai dengan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan [15]. Pendekatan ini mencakup penggunaan bahan ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang tepat, dan penciptaan ruang terbuka hijau. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas lingkungan serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar tanpa merusak ekosistem sungai [16]. Jika ingin menjadikan kawasan tepi sungai sebagai kawasan wisata, perlu identifikasi potensi fisik dan non fisik berupa atraksi, aksesibilitas, amenitas yang kemudian dianalisis dengan karakteristik pengunjung [17].

Hal ini sejalan jika kita ingin mengubah kawasan kumuh menjadi kawasan wisata produktif. Pengembangan tepi air yang berkelanjutan memiliki potensi untuk menciptakan kawasan yang tangguh dan hidup, yang akan menarik bagi generasi mendatang dengan menggabungkan kepekaan ekologis dan perhatian sosial serta ekonomi [18]. Fasilitas penunjang untuk kawasan tentu juga diperlukan, yang berdampak pada lingkungan di sekitar sungai, terutama fungsi tata ruang yang terlihat dari perubahan penggunaan lahan [19]. Beberapa dimensi juga penting untuk diperhatikan seperti : ekologi, budaya, sosial, ekonomi, dan politik, agar kawasan tumbuh secara menyeluruh.

Pemerintah Kota Payakumbuh dalam membuat konsep kawasan tepi sungai batang agam juga memperhatikan hal diatas. Terutama masalah budaya lokal, dimana ini dapat menciptakan lanskap urban yang unik dan menarik. Pengembangan simbiotik ini tidak hanya melestarikan warisan budaya daerah, tetapi juga meningkatkan citra dan daya tarik kota, serta memperkuat kohesi sosial dan identitas budaya setempat. Hal ini sejalan dengan penelitian, dimana Program revitalisasi dan pengembangan tepi sungai perkotaan dilakukan untuk mengembalikan fungsi sosial, budaya, dan warisan sungai, serta memperbaiki kualitas kehidupan di pemukiman sekitar.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Payakumbuh ini juga merupakan untuk pengembangan infrastruktur, peningkatan jalur pejalan kaki, serta penanaman ruang hijau di sekitar sungai seperti tepi sungai di Asheville. Selain itu pengelolaan dan zonasi kawasan perairan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alternatif mata pencaharian dan pengembangan usaha ekonomi lokal juga penting. Penataan zonasi yang tepat dapat memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Inilah salah

satu yang mendasari penelitian ini untuk melihat bagaimana dampak bagi masyarakat lokal setempat dengan kebijakan penataan ini. Diharapkan dengan langkah-langkah ini dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif [20].

Namun harus menjadi evaluasi untuk pengambil kebijakan agar tidak optimalnya hasil yang didapat dari penataan kawasan seperti di tepian sungai Gajah Wong di Yogyakarta dan sungai Bilu di Banjarmasin. Penelitian ini penting karena memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan penataan kawasan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah yang memiliki potensi ekonomi berbasis sungai. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi logistik. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara dengan 106 pelaku usaha di sekitar kawasan Batang Agam, Kota Payakumbuh. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah peningkatan pendapatan masyarakat, sementara variabel independen meliputi peraturan zonasi kawasan (X_1), infrastruktur (X_2), dan kualitas lingkungan (X_3). Analisis data dilakukan dengan menggunakan model regresi logistik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang signifikan memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Populasi penelitian adalah pelaku usaha di sepanjang kawasan Batang Agam, dengan fokus pada segmen Jalan Sutan Syahrir hingga Jalan Hasanudin. Data dianalisis menggunakan software statistik untuk menguji signifikansi variabel-variabel yang diteliti. Untuk menguji hubungan antara penataan kawasan Batang Agam dan kesejahteraan masyarakat, penelitian ini menggunakan Regresi Logistik Biner. Metode ini digunakan karena variabel dependen berupa data dikotomi (biner), yaitu 1 = Ada peningkatan kesejahteraan (ditandai dengan peningkatan pendapatan). 0 = Tidak ada peningkatan kesejahteraan

Sedangkan variabel independen meliputi X_1 = Kebijakan Zonasi Kawasan. X_2 = Infrastruktur (jalan, RTH, fasilitas sosial/publik). X_3 = Kualitas Lingkungan.

Persamaan dasar Regresi Logistik Biner adalah sebagai berikut di mana $P(Y)$ merupakan probabilitas peningkatan kesejahteraan. β_0 adalah konstanta, β_1 , β_2 , β_3 merupakan koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. X_1 , X_2 , X_3 adalah variabel independen. Untuk menyederhanakan interpretasi, model ini ditransformasikan ke dalam bentuk logit. Nilai dari koefisien β menunjukkan bagaimana perubahan pada variabel independen mempengaruhi log odds dari peningkatan kesejahteraan.

Uji Signifikansi Model. Setelah model regresi logistik dibangun, dilakukan pengujian signifikansi menggunakan Likelihood Ratio Test (G-Test) dengan rumus: di mana L_0 = Likelihood dari model tanpa variabel independen (hanya konstanta). L_1 = Likelihood dari model dengan variabel independen. Nilai G-Test ini kemudian dibandingkan dengan distribusi Chi-Square untuk menentukan apakah variabel independen secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Parsial (Wald Test) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen, digunakan Uji Wald dengan rumus di mana W merupakan statistik wald. β_j adalah koefisien regresi dari variabel independen ke-j. $SE(\beta_j)$ adalah standard error dari koefisien regresi ke-j. Jika nilai p-value < 0,05, maka variabel independen tersebut dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Odds Ratio ($\text{Exp}(\beta)$). Hasil regresi logistik juga dikonversi ke dalam bentuk Odds Ratio (OR) untuk menginterpretasikan peluang perubahan kesejahteraan. Rumusnya adalah di mana Θ menunjukkan seberapa besar kemungkinan peningkatan kesejahteraan terjadi jika variabel independen meningkat satu unit. Misalnya, jika OR = 2, maka peluang kesejahteraan meningkat dua kali lipat dibandingkan kondisi sebelumnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Karakteristik Responden disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Karakteristik Responden

Variabel	Kategori	Jumlah	Persentase(%)
Usia	<17 tahun	8	7,5
	17-25 tahun	15	14,2
	26-30 tahun	24	22,6
	31-40 tahun	29	27,4
	>40 tahun	30	28,3
Jenis Kelamin	Laki-laki	58	54,7
	Perempuan	48	45,3
Pendidikan	SD/Sederajat	13	12,3
	SMP/Sederajat	17	16,0
	SMA/Sederajat	33	31,1
	Diploma/Sarjana	31	29,2
	Tidak Sekolah	12	11,3
Status Pernikahan	Menikah	75	70,8
	Belum Menikah	20	18,9
	Cera	11	10,4

Mayoritas responden berada dalam kelompok usia produktif (26-40 tahun), yang mencakup 50% dari total responden. Sebagian besar responden berpendidikan minimal SMA (60,3%), menunjukkan bahwa tingkat pendidikan relatif baik di kalangan pelaku usaha. Status pernikahan mayoritas adalah menikah (70,8%), yang mungkin mencerminkan tanggung jawab ekonomi yang lebih besar. Selanjutnya hasil karakteristik usaha responden disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Karakteristik Usaha Responden

Variabel	Kategori	Jumlah	Persentase(%)
Jenis Usaha	Kuliner	79	74,5
	Jasa	13	12,3
	Lainnya	14	13,2
	<1 tahun	66	62,3
Lama Usaha	1-3 tahun	34	32,1
	>3 tahun	6	5,6
	Milik Sendiri	89	84,0
	Kerjasama/ Kemitraan	16	15,1
Status Kepemilikan	Warisan	1	0,9
	Orang Tua	70	66,0
	Sendiri	16	15,1
	Bantuan Keluarga/ Kerabat	14	13,2
Sumber Modal	Pinjaman Bank/ Lembaga	6	5,7
	Lainnya		

Mayoritas usaha di kawasan Batang Agam bergerak di bidang kuliner (74,5%), yang menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki potensi sebagai destinasi wisata kuliner. Sebagian besar usaha berusia kurang dari 1 tahun (62,3%), yang mungkin mencerminkan dampak positif dari penataan kawasan dalam menarik pelaku usaha baru. Sumber modal utama adalah modal sendiri (66%), menunjukkan bahwa akses ke pembiayaan formal masih terbatas.

Analisis regresi logistik dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat setelah penataan kawasan Batang Agam. Model regresi logistik yang digunakan adalah sebagai berikut persamaan Regresi Logistik di mana merupakan probabilitas peningkatan pendapatan. X_1 adalah Peraturan zonasi kawasan. X_2 adalah Infrastruktur (jalan, ruang terbuka hijau, fasilitas publik). X_3 adalah kualitas lingkungan. Selanjutnya hasil analisis regresi logistik disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Logistik

Variabel	Koefisien (β)	Odds Ratio	P-value
Zonasi Kawasan (X_1)	0,433	1,5426	0,835
Infrastruktur (X_2)	0,787	2,028	0,577
Lingkungan (X_3)	9,967	21.300,88	0,047

Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa kualitas lingkungan (X_3) memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, dengan nilai $p = 0.047 (< 0.05)$. Variabel ini memiliki odds ratio sebesar 21.300,88, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pada kualitas lingkungan meningkatkan peluang peningkatan pendapatan secara signifikan. Sebaliknya, peraturan zonasi kawasan (X_1) dan infrastruktur (X_2) tidak menunjukkan pengaruh

yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan, dengan nilai p masing-masing sebesar 0.835 dan 0.577.

Temuan ini mengindikasikan bahwa lingkungan yang bersih, aman, dan terkelola dengan baik merupakan faktor utama yang mendorong aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan Batang Agam. Sementara itu, peraturan zonasi dan infrastruktur yang ada belum memberikan dampak yang signifikan, kemungkinan karena implementasinya yang belum optimal atau tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh pendapatan, tetapi juga oleh kapabilitas masyarakat untuk menjalani kehidupan yang produktif. Lingkungan yang baik, seperti kebersihan dan keamanan, merupakan faktor penting yang mendukung aktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Hasil ini juga menunjukkan bahwa kebersihan dan keamanan lingkungan merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan wisata. Di sisi lain, temuan bahwa peraturan zonasi dan infrastruktur tidak signifikan mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan yang terlalu terfokus pada aspek fisik tanpa mempertimbangkan kebutuhan lokal mungkin tidak efektif. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pendekatan pembangunan yang lebih holistik, dengan memprioritaskan pengelolaan lingkungan dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Kebijakan zonasi dan infrastruktur harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal agar dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan Batang Agam, sementara peraturan zonasi dan infrastruktur belum memberikan dampak yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan penataan kawasan harus lebih memprioritaskan pengelolaan lingkungan dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Peraturan zonasi kawasan tampaknya belum diimplementasikan secara efektif atau belum sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga manfaatnya belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Selain itu juga banyak masyarakat yang belum terlalu paham akan pentingnya peran zonasi ini dalam menjaga ekologis dan keberlanjutan lingkungan di kawasan ini. Sementara itu, infrastruktur yang sudah dibangun dan di revitalisasi sedemikian rupa oleh pemerintah mungkin belum dirasakan optimal dalam mendukung kegiatan usaha, baik dari segi aksesibilitas maupun kualitas fasilitas yang disediakan. Berdasarkan temuan dari penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan kawasan Batang Agam. Mengingat lingkungan yang bersih, aman, dan terkelola dengan baik terbukti memiliki dampak positif terhadap

kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus memprioritaskan pengelolaan lingkungan kawasan Batang Agam. Hal ini termasuk pengelolaan sampah yang lebih efektif, peningkatan fasilitas kebersihan umum, dan penataan ruang yang nyaman dan aman bagi masyarakat dan pelaku usaha. Langkah ini akan menciptakan suasana yang mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Evaluasi dan optimalisasi zonasi kawasan perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Jika zonasi yang diterapkan tidak relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka dampaknya terhadap ekonomi lokal akan terbatas. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai zonasi yang sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial kawasan, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan untuk memastikan bahwa kebijakan zonasi dapat mendukung pengembangan ekonomi secara optimal.

Daftar Rujukan

- [1] Sanoff, H. (2005). Community Participation In Riverfront Development. *CoDesign*, 1(1), 61–78. DOI: <https://doi.org/10.1080/15710880512331326022> .
- [2] Kim, K. T., & Song, J. (2015). The Effect of the Cheonggyecheon Restoration Project on the Mitigation of Urban Heat Island. *Journal of Korea Planners Association*, 50(4), 139. DOI: <https://doi.org/10.17208/jkpa.2015.06.50.4.139> .
- [3] Firianti, W. R. (2019). Penataan Kawasan Sungai Winongo Berbasis Partisipasi Masyarakat di Pakuncen Yogyakarta. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 3(1). DOI: <https://doi.org/10.14421/jpm.2019.031-10> .
- [4] Lestari, F., Refranisa, R., & Wicaksono, R. (2022). Strategi Penataan Kampung Wisata Tepi Sungai. *Jurnal Arsitektur dan Perencanaan (JUARA)*, 5(2), 1–14. DOI: <https://doi.org/10.31101/juara.v5i2.2292> .
- [5] Riasmi, M. I., Agusintadewi, N. K., & Widiastuti, W. (2022). Strategi Penanganan Kawasan Tepian Sungai Tukad Yeh Poh sebagai Recreational Waterfront Kabupaten Badung. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 18(3), 272–282. DOI: <https://doi.org/10.14710/pwk.v18i3.37520> .
- [6] Dewi, L. M. R. R., Suartika, G. A. M., & Saputra, K. E. (2021). Riverfront Development-A Public Realm, Its Adaptations, and Environmental Impacts. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 903). IOP Publishing Ltd. DOI: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/903/1/012013> .
- [7] Evans, C., Harris, M. S., Taufen, A., Livesley, S. J., & Crommelin, L. (2022). What Does It Mean for A Transitioning Urban Waterfront to Work From A Sustainability Perspective?. *Journal of Urbanism*. DOI: <https://doi.org/10.1080/17549175.2022.2142648> .
- [8] Xie, C. (2023). The Symbiotic Development of Urban Waterfront Spaces and Regional Culture: Unleashing Potentials, Innovative Design, and Sustainable Development. *Journal of Innovation and Development*, 3(2), 26–30. DOI: <https://doi.org/10.54097/jid.v3i2.9144> .
- [9] Simons, S., Kinjawadekar, A., & Kinjawadekar, T. A. (2023). Assessing The Impacts of Ecological Framework of Indian Riverfront Revitalization Projects. *Environment, Development and Sustainability*. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10668-023-03771-3> .
- [10] Rahman, S., Mentayani, I., Rusmilyasari, R., & Mahreda, E. S. (2019). Konsep Penataan Permukiman Kumuh Tepian Sungai di Kelurahan Sungai Bilu Kota Banjarmasin. *EnviroScienceteae*, 15(3), 397. DOI: <https://doi.org/10.20527/es.v15i3.7434> .
- [11] Davis, K. A., Phyak, P., & Bui, T. T. N. (2012). Multicultural Education as Community Engagement: Policies and Planning in a Transnational Era. *International Journal of Multicultural Education*, 14(3). DOI: <https://doi.org/10.18251/ijme.v14i3.625> .
- [12] Mahameru, Y. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembangunan Infrastruktur Daerah. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(2), 120. DOI: <https://doi.org/10.37064/jpm.v9i2.9365> .
- [13] Adiyanta, F. C. S. (2019). Karakteristik Responsif Peraturan Daerah tentang Pajak-pajak Daerah sebagai Representasi dan Partisipasi Kehendak Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 380–399. DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.380-399> .
- [14] Permatasari, D., Pinem, J., Syaifullah, Haryanto, B., Subhan, & Sariatun. (2020). Development of Biodiversity Scopes from Nature Conservation to The Community Centralization – Cement Tonasa Manufacturing, Indonesia. *International Journal of Environmental Science and Development*, 11(3), 148–153. DOI: <https://doi.org/10.18178/IJESD.2020.11.3.1242> .
- [15] Khakee, A. (1996). Urban Planning In China and Sweden In A Comparative Perspective. *Progress in Planning*, 46(2), 91–140. DOI: [https://doi.org/10.1016/0305-9006\(96\)00004-9](https://doi.org/10.1016/0305-9006(96)00004-9) .
- [16] Podungge, A. W., Nuna, M., & Akuba, F. (2023). Pengembangan Wisata Bahari dengan Pendekatan Ekonomi Kreatif di Kawasan Pesisir Pantai Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 10(4), 1412–1427. DOI: <https://doi.org/10.37606/publik.v10i4.962> .
- [17] Himawan, & Anik Vega Vitaningsih. (2023). Regional Development Planning Strategy Through the Digital Village Program to Realize the Welfare of Rural Communities. *Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA)*, 2(1), 45–58. DOI: <https://doi.org/10.55927/esa.v2i1.2683> .
- [18] Corwin, D. L. (2016). 23.2 Regional Academies for Raising Community Awareness About Health Impacts of Violence and Abuse. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 55(10), S36. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2016.07.573> .
- [19] Voityk, O., & Mazii, N. (2021). Problems and Prospects of Strategic Planning of Regional Development. *Democratic Governance*, (27). DOI: <https://doi.org/10.33990/2070-4038.27.2021.239190> .
- [20] Iijima, K., Arai, H., Akishita, M., Endo, T., Ogasawara, K., Kashiwara, N., ... Ouchi, Y. (2021). Toward the development of a vibrant, super-aged society: The future of medicine and society in Japan. *Geriatrics and Gerontology International*, 21(8), 601–613. DOI: <https://doi.org/10.1111/ggi.14201> .